



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RENJA PERUBAHAN DINPUSARDA



2023

JL. SUROHADIKUSUMO
NO. 1 PEMALANG
KODE POS 52312
TELP. (0284)324657

KATA PENGANTAR

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II serta perubahan rencana kerja dan pendanaan.

Perubahan Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran, program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai setelah disesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemalang, Agustus 2023
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pemalang
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan,
Ekonomi dan Keuangan,



Drs. TUTUKO RAHARJO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2023	II-7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-31
BAB IV PENUTUP	IV-48
4.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	IV-48
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	IV-48
4.3 Rencana Tindak Lanjut	IV-49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Status Capaian Kinerja dan Anggaran	II-8
Tabel 2.2 Evaluasi Renja Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Dinpusarda	II-10
Tabel 2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Dinpusarda Kabupaten Pematang Triwulan II Tahun 2023.....	II-25
Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinpusarda pada Perubahan APBD Kabupaten Pematang Tahun 2023.....	III-33

T. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan permasalahan dan isu strategis yang ada. Dinamika kondisi perekonomian dan adanya kebijakan daerah yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu disesuaikan juga. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Pengesahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Sehubungan adanya perkembangan, terutama penyesuaian terhadap proyeksi kerangka ekonomi makro daerah, proyeksi kerangka pendanaan, pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka Peraturan Bupati tersebut perlu disesuaikan. Saat ini telah terbit Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 356 menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Perubahan Renja Tahun

2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. Perubahan Renja tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2023 perlu disusun perubahan terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2023 karena :

1. Penyesuaian belanja daerah karena realisasi SiLPA lebih tinggi dari proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2023 dan adanya proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023;
2. Penyesuaian target kinerja kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
 - Pengumpulan materi hasil evaluasi capaian Renja sampai dengan triwulan II tahun 2023
 - Pengumpulan materi perubahan RKPD tahun 2023
2. Penyusunan rancangan
 - Dilakukan setelah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang menerima Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor 965/2136 Tanggal 17 Juli 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Pemalang.
 - Penyusunan Rancangan Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang sampai dengan triwulan II tahun 2023
3. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan rancangan perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2023
 - Diverifikasi oleh Bappeda
4. Penetapan
 - Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023, berdasarkan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
 20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
 21. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2023 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pepenyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah dan menciptakan efesiensi akokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan;
2. Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun

- 2023, faktor-faktor penyebab status capaian kinerja sangat rendah dan rendah;
3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan perubahan Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya;
 4. Bab IV Penutup, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpusarda) Kabupaten Pemalang merupakan instansi pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Dinpusarda mempunyai 2 (dua) tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yaitu **“Meningkatkan Budaya Literasi di Masyarakat”** yang diukur dengan indikator **nilai budaya literasi** dengan rumusan rerata dari persentase penduduk yang membaca baik cetak maupun elektronik, persentase penduduk yang mengakses internet, dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/taman baca masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu **“Meningkatkan birokrasi akuntabel”** yang diukur dengan indikator **indeks kearsipan** yang merupakan penilaian dari ANRI meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan kearsipan internal.

Sasaran jangka menengah Dinpusarda Kabupaten Pemalang yang akan dicapai selama tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. **“Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat”** yang diukur dengan **indikator indeks pembangunan literasi masyarakat**. Unsur pembangunan literasi masyarakat, meliputi pemerataan, layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan anggota perpustakaan.
2. **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan”** yang diukur dengan indikator **persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik** dengan rumusan jumlah OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik dibagi jumlah OPD dikali 100%
3. **“Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap kinerja Dinpusarda yang diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pengunjung perpustakaan.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan

penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dengan menghitung realisasi kinerja dan anggaran dibandingkan dengan targetnya. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 status capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Status Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	47,50% ≤	Sangat tinggi (ST)
2	38,76% ≤ 47,50%	Tinggi (T)
3	31,26 ≤ 38,75%	Sedang (S)
4	22,51% ≤ 31,25%	Rendah (R)
5	≤ 22,50%	Sangat Rendah (SR)

Pada APBD Penetapan Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023 Dinpusarda mendapat alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 4.942.086.000 untuk membiayai 4 program dan 11 kegiatan serta 31 sub kegiatan. Terdiri dari anggaran rutin operasional sebanyak Rp. 1.603.148.500 dan gaji beserta tunjangan sebesar Rp. 3.338.937.500. Namun pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang mendapatkan alokasi anggaran melalui DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp. 469.016.000 untuk kegiatan rehab gedung layanan perpustakaan, namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/ PMK.07/ 2022 sub kegiatan yang ada di bidang perpustakaan merupakan sub kegiatan pendukung yang didanai dari DAU Bidang Pendidikan, oleh sebab itu anggaran penetapan pada bidang perpustakaan yang berjumlah Rp. 493.898.500 termasuk

kedalam DAU Bidang pendidikan, sehingga jumlah total DAU Bidang Pendidikan adalah Rp. 962.914.500. Berdasarkan penjelasan tersebut maka total alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya adalah Rp. 5.411.102.000.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 2.234.679.266 atau sebesar 61,28% dari total anggaran 2023. Penyerapan anggaran sebesar 61,28% masuk pada kategori sangat tinggi (ST). Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 41,30%. Realisasi kinerja sebesar 41,30% tersebut masuk pada kategori tinggi (T).

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya. Berikut ini disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpusarda Kabupaten Pematang Jaya Triwulan II Tahun 2023 secara lebih rinci hingga sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.2.

Evaluasi Renja Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Anggaran Renja OPD pada Triwulan I (Tahun 2023)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2023)		Status Capaian		Keterangan	OPD Penanggungjawab
			Penetapan		I		II		III		IV		Total		12	13				
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		(10 = 6+7+8+9)		(11 = 10/5*100)				14	15
2																				
2																				
2	2	3																		
2	2	3	0	1																

							IRB	Skor	58,62	776.969.920		194.021.325		198.325.529		0		0	0		392.346.854	0,00	50,50	SR	ST	Penyesuaian dengan RB Tematik	DINPUSAR DA	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.458.980		11.063.229		4.682.372		0		0		15.745.601		33,89		T				DINPUSAR DA
							Keluran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	10	5	0	0	0	5				50,00		ST							DINPUSAR DA
							Hasil Kegiatan	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	%	100	50	0	0	0	50				50,00		ST							DINPUSAR DA
2	23	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	8.842.980	0	3.172.000	0	221.238				0	3.393.238	0,00	38,37	SR	T		dokumen masih dalam proses pengerjaan	DINPUSAR DA		
2	23	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	4.905.400	1	2.924.600	0	0				1	2.924.600	100,00	59,62	ST	ST				DINPUSAR DA	

2	2	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	5.514.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR	dilaksanakan pada TW III	DINPUSAR DA
2	2	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	5.065.100	1	809.500	0	3.741.134	1	4.550.634	100,00	89,84	ST	ST		DINPUSAR DA
2	2	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	3.765.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR	dilaksanakan pada TW III	DINPUSAR DA	
2	2	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	3	4.908.200	3	4.157.129	0	720.000	3	4.877.129	100,00	99,37	ST	ST		DINPUSAR DA
2	2	0	2,0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	13.457.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR	anggaran kas tersedia pada TW III	DINPUSAR DA	
2	2	0	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.344.758.600		677.109.749		906.373.827	0	0	1.583.483.576	47,34		T		DINPUSAR DA

						Keluran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	2	1	0	0	0	1	50,00	ST				DINPUSAR DA	
						Hasil Kegiatan	Presentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	50	0	0	0	50	50,00	ST				DINPUSAR DA	
2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	23	3.338.937.500	19	674.618.949	18	905.142.636	19	1.579.761.585	82,61	47,31	ST	T	Jumlah PNS (yang dibayarkan gajinya di triwulan I)	DINPUSAR DA
2	23	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	3.739.600	1	2.490.800	0	1.231.191	1	3.721.991	100,00	99,53	ST	ST		DINPUSAR DA
2	23	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi	dokumen	1	2.081.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR	Dilaksanakan pada triwulan III	DINPUSAR DA
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				213.080.920		60.361.342		52.449.289	0	0	112.810.631	52,94		ST		DINPUSAR DA
2	23	01	02.06		Keluran Kegiatan	jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	6		6				6	100,00		ST				DINPUSAR DA

					Hasil Kegiatan	Presentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	0	0	0	100	100,00	ST		DINPUSAR DA				
2	23	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	8	4.720.000	4	1.948.500	2	1.337.500	6	3.286.000	75,00	69,62	ST	ST	DINPUSAR DA	
2	23	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	13	4.684.900	3	2.575.500	4	1.599.900	7	4.175.400	53,85	89,12	ST	ST	DINPUSAR DA	
2	23	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	20	53.101.120	4	13.873.850	5	9.193.289	9	23.067.139	45,00	43,44	T	T	DINPUSAR DA	
2	23	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan penggandaan yang disediakan	paket	7	12.088.900	2	3.244.050	3	2.006.850	5	5.250.900	71,43	43,44	ST	T	DINPUSAR DA	
2	23	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	96	12.695.000	24	1.958.000	24	1.342.000	48	3.300.000	50,00	25,99	ST	R	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian aplikasi FMIS	DINPUSAR DA
2	23	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	laporan	120	125.791.000	30	36.761.442	30	36.969.750	60	73.731.192	50,00	58,61	ST	ST	DINPUSAR DA	
2	23	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			421.605.000		83.034.646		104.263.350	0	0	187.297.996	44,42		T		DINPUSAR DA	

						Keluaran Kegiatan	jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	jasa	3	3					3	100,00	ST				DINPUSAR DA	
						Hasil Kegiatan	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	0	0	0	100	100,00	ST					DINPUSAR DA	
2	23	01	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	3.605.000	3	328.000	3	250.000	6	578.000	50,00	16,03	ST	SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian aplikasi FMIS	DINPUSAR DA
2	23	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	100.000.000	3	29.826.648	3	24.693.353	6	54.520.001	50,00	54,52	ST	ST		DINPUSAR DA
2	23	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	48	318.000.000	12	52.879.998	12	79.319.997	24	132.199.995	50,00	41,57	ST	T		DINPUSAR DA
2	23	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.284.000		50.625.337		41.612.890		92.238.227		64,83		ST		DINPUSAR DA

					Keluran Kegiatan	jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	50		13		22		0	0	35		70,00		ST		DINPUSAR DA	
					Hasil Kegiatan	Presentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100		26		44		0	0	70		70,00		ST		DINPUSAR DA	
2	23	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	32	71.404.000	9	23.592.801	12	17.729.834			21	41.322.635	65,63	57,87	ST	ST	DINPUSAR DA	
2	23	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya dipelihara	unit	16	10.880.000	2	480.000	8	2.850.900			10	3.330.900	62,50	30,61	ST	R	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian aplikasi FMIS	DINPUSAR DA
2	23	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	unit	2	60.000.000	2	26.552.536	2	21.032.156			2	47.584.692	100,00	79,31	ST	ST	DINPUSAR DA	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor	55,45	962.914.500		48.130.355		70.753.140	0	0	118.883.495	0,00	12,35	SR	SR	dilaksanakan pada TW IV	DINPUSAR DA	
						Persentase Perpustakaan Terstandarisasi	%	3,13										0,00		SR			
2	23	02	2,01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			337.000.000			44.316.955		33.460.860	0	0	77.777.815		23,08		R	Pengadaan Buku/Bahan Pustaka dilaksanakan pada TW III	DINPUSAR DA	

						Keluran Kegiatan	Jumlah perpustakaan tingkat daerah yang tersedia	unit	4		4		4		0	0	4	100,00	ST		DINPUSAR DA			
						Hasil Kegiatan	Presentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola	%	100		100		100		0	0	100	100,00	ST		DINPUSAR DA			
2	23	02	2,01	07		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	layanan	4	337.000.000	4	44.316.955	4	33.460.860			4	77.777.815	100,00	23,08	ST	R	target 4 layanan ini rutin dilaksanakan setiap bulan (layanan perpustakaan, layanan taman baca masyarakat, layanan baca ditempat, layanan anak) realisasi keuangan masih dalam proses pengentryan pada aplikasi FMIS	DINPUSAR DA
						Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				625.914.500		3.813.400		37.292.280	0	0	41.105.680	6,57		SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III	DINPUSAR DA		
2	23	02	2,02			Keluran Kegiatan	jumlah aktivitas pembudayaan gemar membaca	kegiatan	3		0	0	0	0	0	0	0,00		SR		terdapat pergeseran anggaran serta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada TW III	DINPUSAR DA		

						Hasil Kegiatan	Persentase capaian aktivitas kebudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	%	100	0	0	0	0	0	0	0,00	SR		terdapat pergeseran anggaran serta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada TW III	DINPUSAR DA						
2	23	02	2,02	02		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	1	549.016.000	0	3.316.000	0	37.292.280	0	40.608.280	0,00	7,40	SR	SR	kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	DINPUSAR DA				
2	23	02	2,02	04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan	2	76.898.500	0	497.400	0	0	0	497.400	0,00	0,65	SR	SR	dilaksanakan pada pertengahan bulan juli	DINPUSAR DA				
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			13.205	280.000.000	3952	38.584.580	4132	85.635.160	0	0	0	0	8084	124.219.740	61,22	44,36	ST	T		DINPUSAR DA
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	17,7	270.000.000		38.584.580		84.184.610	0	0	0	122.769.190	0,00	45,47	SR	T	dilaksanakan pada triwulan IV	DINPUSAR DA		
2	24	02	2,01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				204.010.000		33.779.080		80.656.890	0	0		114.435.970		56,09		ST			DINPUSAR DA	
						Keluran Kegiatan	jumlah arsip dinamis yang terkelola	berkas	9.204		2551		3755	0	0	6306		68,51		ST					DINPUSAR DA	

					Hasil Kegiatan	Presentase arsip dinamis yang terkelola	%	100,00		27,72		40,80		0,00		0,00		68,51		68,51		ST		DINPUSAR DA						
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	1.200	32.500.000	360	3.140.500	309	2.283.770					669	5.424.270	55,75	16,69	ST	SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian aplikasi FMIS	DINPUSAR DA					
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	berkas	8.000	153.000.000	2191	30.638.580	3445	74.588.520					5636	105.227.100	70,45	68,78	ST	ST		DINPUSAR DA					
2	24	02	2,01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	laporan	4	18.510.000	0	0	1	3.784.600					1	3.784.600	25,00	20,45	R	SR	laporan pengawasan kearsipan eksternal sudah diterima oleh dinpusarda, namun laporan pengawasan kearsipan internal masih dalam proses pengerjaan	DINPUSAR DA					
2	24	02	2,02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000		225.000		1.566.720					0	0	1.791.720		5,12		SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian aplikasi FMIS	DINPUSAR DA				
					Keluran Kegiatan	jumlah arsip statis yang terkelola	berkas	3.000		1000		200										0	0	1200		40,00		T		DINPUSAR DA
					Hasil Kegiatan	Presentase arsip statis yang terkelola	%	100,00		33,33		6,67										0,00	0,00	40,00		40,00		T		DINPUSAR DA

2	2	0	2,0	0	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Arsip	3.000	35.000.000	1000	225.000	200	1.566.720			1200	1.791.720	40,00	5,12	T	SR	realisasi tersebut adalah realisasi arsip statis yang sudah diakuisisi oleh LKD (Dinpusarda) sementara arsip statis yang di Lembaga Pencipta Arsip (OPD/sekolah/Kecamatan/Desa) diakuisisi setelah dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan monev pengelolaan arsip, pada triwulan II telah dilakukan akuisisi arsip pada 6 lokus desa dengan jumlah 200 arsip. Realisasi keuangan masih dalam proses pengentryan pada aplikasi FMIS	DINPUSAR DA
2	2	0	2,0	3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				30.990.000		4.580.500		1.961.000	0	0		6.541.500		21,11		SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian aplikasi FMIS	DINPUSAR DA
					Keluran Kegiatan	jumlah aktivitas pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	kegiatan	1		1		0		0	0	1		100,00		ST			DINPUSAR DA

					Hasil Kegiatan	Presentase aktivitas pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	%	100	100	0	0	0	100	100,00	ST		DINPUSAR DA					
2	24	02	2,03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Pengguna	2	30.990.000	0	4.580.500	0	1.961.000	0	6.541.500	0,00	21,11	SR	SR	Pembuatan akun JIKN dan pengajuan persyaratan agar dapat tergabung ke JIKN pusat telah selesai namun belum mendapatkan balasan dari ANRI	DINPUSAR DA	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	7,1	10.000.000	0	0	1.450.550	0	0	0	1.450.550	0,00	14,51	SR	SR	dilaksanakan pada triwulan IV	DINPUSAR DA
2	24	03	2,01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				10.000.000	0	0	1.450.550	0	0	1.450.550		14,51	SR		Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian aplikasi FMIS	DINPUSAR DA	
					Keluran Kegiatan	jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	berkas	1000	400	177	0	0	577	57,70	ST						DINPUSAR DA	

					Hasil Kegiatan	Presentase arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	%	100	40	17,7	0	0	57,7	57,70	ST		DINPUSAR DA				
2	24	03	2,01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	berkas	1000	10.000.000	400	0	177	1.450.550	577	1.450.550	57,70	14,51	ST	SR	Masih proses penilaian. Belum dilakukan proses pemusnahan. Pemusnahan akan dilakukan di akhir triwulan III	DINPUSAR DA

Berdasarkan tabel 2.2 masih terdapat sub kegiatan yang menunjukkan status capaian kinerja dan keuangan SR dan R. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rencana pelaksanaan yang memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV tahun 2023. Sub Kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - e. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2. Sudah dilaksanakan namun tertunda administrasi keuangannya karena..... Sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
 - b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - e. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - f. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
 - g. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
3. Rencana pelaksanaan dijadwalkan pada triwulan II akan tetapi dikarenakan padatnya kegiatan pelayanan perpustakaan keliling, keterbatasan SDM, pendataan perpustakaan dan proses tender pada aplikasi LPSE maka pelaksanaan diundur pada awal triwulan III
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
4. Beberapa sub kegiatan yang proses pengerjaannya dimulai dari triwulan II namun akan selesai pada triwulan III :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemberdayaan SDM secara optimal terutama pada tenaga Non ASN yang tersedia untuk dapat membantu mendukung pelaksanaan pencapaian target kinerja
2. Melakukan percepatan proses administrasi keuangan.
3. Membuat *timeline schedule* daftar target yang harus dicapai per triwulan agar kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

Untuk evaluasi indikator kinerja utama perangkat daerah, indikator kinerja program serta anggaran program sampai triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

Evaluasi Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Pemalang Triwulan II Tahun 2023

Program	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Capaian 2022	Target 2023	Total Anggaran Tahun 2023	Realisasi								Total		Capaian (%)		Status Capaian		Keterangan	OPD							
							TW I		TW II		TW III		TW IV		(10 = 8+10+12+14)		K	Rp	K	Rp			K	Rp					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20	21	22	23							
IKU	Nilai budaya literasi	%	27,23	28,98	24,80	962.914.500		48.130.355		70.753.140						118.883.495		12,35	SR	SR	Realisasi Kinerja dilaksanakan pada TW IV	DINPU SARD A							
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8,50	15,47	7,600																							Realisasi Kinerja dilaksanakan pada TW IV	DINPU SARD A
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,20	85,45	82,50						81,25													98,48		ST		Realisasi Kinerja dilaksanakan per semesteran	DINPU SARD A
	Indeks kearsipan	Indeks	59,12	19,81	57,12		280.000.000		38.584.580			85.635.160												124.219.740		44,36	SR	T	Realisasi Kinerja dilaksanakan pada TW IV

	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	100,00	77,08	40,00													SR	Realisasi Kinerja dilaksanakan pada TW IV	DINPU SARD A	
IKK	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	55,55	49,68	55,45													SR	Realisasi Kinerja dilaksanakan pada TW IV	DINPU SARD A	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8,50	15,47	7,600	962.914.500		48.130.355		70.753.140					118.883.495		12,35	SR	Realisasi Kinerja dilaksanakan pada TW IV	DINPU SARD A	
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. Pasal 40 dan pasal 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	17,70	70,44	17,70	280.000.000		38.584.580		85.635.160					124.219.740		44,36	SR	T	Realisasi Kinerja dilaksanakan pada TW IV	DINPU SARD A

	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	7,74	33,33	7,10																SR		Realisasi Kinerja dilaksanakan pada TW IV	DINPU SARD A
URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR					13.286	5.411.102.000	3984	968.909.238	4158	1.265.770.028	0	0	0	0	8.142	2.234.679.266	61,28	41,30	ST	T				DINPU SARD A
URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERPUST AKAAN					81	5.131.102.000	32	930.324.658	26	1.180.134.868	0	0	0	0	58	2.110.459.526	71,60	41,13	ST	T				DINPU SARD A

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	Skor	48,68	61,40	48,62	3.391.217.580		688.172.978	62,00	911.056.199		0	0	62,00	1.599.229.177	127,52	47,16	ST	T		DINPUSARDA
	IRB	Skor	63,87	44,29	58,62	776.969.920		194.021.325		198.325.529		0	0	0	392.346.854	0,00	50,50	SR	ST	Penyesuaian dengan RB Tematik	DINPUSARDA
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor	55,55	49,68	55,45	962.914.500		48.130.355		70.753.140		0	0	118.883.495	0,00	12,35	SR	SR	dilaksanakan pada TW IV	DINPUSARDA	
	Persentase Perpustakaan Terstandarisasi	%	5,66	2,03	3,13		0,00		SR		SR										
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN				13,205		280.000.000	3952	38.584.580	4132	85.635.160	0	0	0	8084	124.219.740	61,22	44,36	ST	T		DINPUSARDA
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	17,7	70,44	17,7	270.000.000		38.584.580		84.184.610		0	0	0	122.769.190	0,00	45,47	SR	T	dilaksanakan pada triwulan IV	DINPUSARDA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	8,39	33,33	7,1	10.000.000		0		1.450.550		0	0	0	1.450.550	0,00	14,51	SR	SR	dilaksanakan pada triwulan IV	DINPUSARDA

Berdasarkan tabel 2.3 masih terdapat indikator yang menunjukkan status capaian kinerja dan keuangan SR dan R Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rencana pelaksanaan yang memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV tahun 2023. Indikator tersebut yaitu :
 - a. Nilai Budaya Literasi
 - b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
 - c. Indeks Kearsipan
 - d. Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik
 - e. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
 - f. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja
 - g. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
2. Indikator yang capaiannya rendah dikarenakan penyesuaian dengan RB General, dan penilaiannya dilaksanakan IV
 - a. Nilai IRB

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Intensitas layanan – layanan perpustakaan kepada masyarakat
2. Melakukan publikasi melalui momen edukasi yaitu sosialisasi, bimbingan teknis dan media sosial untuk meningkatkan nilai budaya literasi
3. Untuk mencapai target Indeks pembangunan literasi masyarakat maka yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi media layanan perpustakaan elektronik, peningkatan koleksi perpustakaan secara bertahap serta penyediaan/pembuatan KTA Perpustakaan secara gratis dan cepat dalam rangka menarik minat masyarakat
4. Membuat *Time Schedule* kegiatan Audit Kearsipan
5. Melaksanakan Monev Pengelolaan Arsip untuk mengetahui perkembangan OPD yang telah dibina
6. Melakukan pembinaan kepada OPD yang telah ditetapkan menjadi target binaan pada Tahun 2023.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memuat 4 program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pembinaan Perpustakaan
- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
3. Program Pengelolaan Arsip
- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
 - 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat
 - a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Adapun rekapitulasi perubahan anggaran tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Perubahan APBD Kabupaten Pemalang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cat ata n Pen tin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dan a		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Tar get				
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										4,662,08 6,000	4,921,04 2,500		5,687,78 9,500			
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,168,18 7,500	3,947,12 8,000		4,592,78 9,500			
2	2	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										46,458,9 80	46,458,9 80		63,950,0 00			
2	2	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perpustaka an dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Persentas e dokumen perencana an, pengangg aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pemalan g, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	48,62 Skor	48,62 Skor	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	8,842,980	8,842,980	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Nilai SAKIP Dinas Perpusta kaan dan Kearsipa n	48,6 2 Skor	15,000,00 0

2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,62 Skor	48,62 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	4,905,400	4,905,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48,62 Skor	7,500,000
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,62 Skor	48,62 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,514,200	5,514,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48,62 Skor	6,950,000

2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,62 Skor	48,62 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,065,100	5,065,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48,62 Skor	6,500,000
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,62 Skor	48,62 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,765,800	3,765,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48,62 Skor	5,000,000

2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,62 Skor	48,62 Skor	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	4,908,200	4,908,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48,62 Skor	5,500,000
2	2	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,62 Skor	48,62 Skor	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	13,457,300	13,457,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48,62 Skor	17,500,000
2	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,344,758,600	3,049,199,100				3,348,935,500	

2	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IRB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel		48,62 skor	48,62 skor	23 Orang /Bulan	19 Orang /Bulan	100 %	100 %	3,338,937,500	3,043,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IRB	48,62 skor	3,338,937,500
2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai IRB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,62 skor	48,62 skor	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,739,600	3,739,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IRB	48,62 skor	5,000,000
2	2	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai IRB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,62 skor	48,62 skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,081,500	2,081,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IRB	48,62 skor	4,998,000
2	2	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah											213,080,920	243,380,920				354,304,000	

2	2	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperkirakan pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 Skor	58,62 Skor	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	4,720,000	4,720,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	58,6 2 Skor	8,000,000
2	2	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperkirakan pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 Skor	58,62 Skor	13 Paket	13 Paket	100 %	100 %	4,684,900	5,184,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	58,6 2 Skor	8,600,000
2	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperkirakan pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 Skor	58,62 Skor	20 Paket	20 Paket	100 %	100 %	53,101,120	54,101,120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	58,6 2 Skor	104,650,500

2	2	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 Skor	58,62 Skor	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	12,088,900	13,088,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	58,62 Skor	18,053,500
2	2	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 Skor	58,62 Skor	96 Dokumen	96 Dokumen	100 %	100 %	12,695,000	12,695,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	58,62 Skor	20,000,000
2	2	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 Skor	58,62 Skor	120 Laporan	125 Laporan	100 %	100 %	125,791,000	153,591,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda	58,62 Skor	195,000,000
2	2	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										421,605,000	436,805,000				449,600,000	

2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase jasa penunjang urusan daerah yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 skor	58,62 skor	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,605,000	2,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IRB	58,62 skor	6,600,000
2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IRB	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase jasa penunjang urusan daerah yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 skor	58,62 skor	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	100,000,000	116,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IRB	58,62 skor	125,000,000
2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase jasa penunjang urusan daerah yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 skor	58,62 skor	48 Laporan	48 Laporan	100 %	100 %	318,000,000	318,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IRB	58,62 skor	318,000,000
2	2	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										142,284,000	171,284,000				376,000,000	

2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IRB	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Persentase barang milik daerah yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 skor	58,62 skor	32 Unit	32 Unit	100 %	100 %	71,404,000	80,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IRB	58,62 skor	120,000,000
2	2	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IRB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 skor	58,62 skor	16 Unit	16 Unit	100 %	100 %	10,880,000	10,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IRB	58,62 skor	20,000,000
2	2	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IRB	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memperhatikan pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,62 skor	58,62 skor	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	60,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IRB	58,62 skor	236,000,000
2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										493,898,500	973,914,500				1,095,000,000	
2	2	0	2		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										337,000,000	348,000,000				415,000,000	

2	2	0	2	0	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kelurahan Kab. Pemalang, Randodongkal, Semua Kelurahan Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kelurahan Kab. Pemalang, Taman, Semua Kelurahan Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kelurahan Kab. Pemalang,	55,45 Skor 3,13 %	55,45 Skor 3,13 %	4 Layanan	4 Layanan	100 %	100 %	337,000,000	348,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	55,45 Skor 3,13 %	415,000,000
---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------	----------	-------------	-------------	--------------------------------------	--	-------------------------	-------------

								Ampelga ding, Semua Keluraha n Kab. Pemalan g, Comal, Semua Keluraha n Kab. Pemalan g, Ulujami, Semua Keluraha n Kab. Pemalan g, Warung pring, Semua Keluraha n													
2	2	0	2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							156,898, 500	625,914, 500								680,000, 000

2	2	0	2	0	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten /Kota	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Pulosari, Clekatak an	55,45 Skor 3,13 %	55,45 Skor 3,13 %	1 Perpu stakaan	1 Perpu stakaan	100 %	100 %	80,000,00	549,016,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	55,45 Skor 3,13 %	580,000,000
2	2	0	2	0	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten /Kota yang Dikembangkan	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Bantarbolang Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsangka Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan Kab. Pemalang, Petaruka	55,45 Skor 3,13 %	55,45 Skor 3,13 %	2 Perpu stakaan Desa	2 Perpu stakaan Desa	100 %	100 %	76,898,500	76,898,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	55,45 Skor 3,13 %	100,000,000

2	2	0	2	0	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase arsip dinamis yang dikelola	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,70 %	17,70 %	8000 Berkas	8000 Berkas	100 %	100 %	153,000,000	153,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,70 %	160,000,000
2	2	0	2	0	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,70 %	17,70 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	18,510,000	18,510,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,70 %	65,000,000
2	2	0	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											35,000,000	35,000,000					65,000,000
2	2	0	2	0	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip statis yang dikelola	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,7 %	17,7 %	3000 Arsip	3000 Arsip	100 %	100 %	35,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,7 %	65,000,000
2	2	0	2		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											30,990,000	35,990,000					85,000,000

2	2	0	2	0	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah kabupaten /Kota Melalui JIKN	Presentase Aktivitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,7 %	17,7 %	2 Pengguna	2 Pengguna	100 %	100 %	30,990,000	35,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,7 %	85,000,000	
2	2	0	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											10,000,000	10,000,000				35,000,000	
2	2	0	3	2	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun											10,000,000	10,000,000				35,000,000	
2	2	0	3	2	0	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,10 %	7,10 %	1000 Arsip	1000 Arsip	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	7,10 %	35,000,000
TOTAL																4,942,086,000	5,215,542,500				6,142,789,500	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023 ini adalah :

1. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023;
2. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan yang sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seluruh Bidang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik - baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKAP maupun DPPA untuk tahun 2023.